

**KONSTRUKSI STRATEGI KOMPARTEMENTALISASI AUSTRALIA DALAM
HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MASA KEPEMIMPINAN SCOTT MORRISON**

Stefanus Hendri Putra

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

Email: stif89_hp@hotmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 30-03-2023	Hubungan diplomatik antara Australia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memanas pada masa kepemimpinan Scott Morrison. Arah kebijakan Luar Negeri Partai Liberal yang menitikberatkan kepada sektor keamanan sedikit banyak mempengaruhi arah kebijakan Luar Negeri Scott Morrison selama 3 tahun masa kepemimpinannya. Di Australia dikenal akan strategi kompartementalisasi yang di cetus oleh Perdana Menteri Bob Hawke di mana memiliki fokus menempatkan semua perbedaan penting dari hubungan Australia dan RRT kedalam sebuah kotak dan memisahkan mereka di satu tempat. Lantas, bagaimana konstruksi dari strategi kompartementalisasi selama masa pemerintahan Scott Morrison?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ide dan persepsi strategi kompartementalisasi Australia dalam hubungan diplomatik dengan RRT selama masa pemerintahan Scott Morrison. Metode penelitian yang dipakai adalah dalam koridor kajian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil konstruksi menunjukkan bahwa strategi kompartementalisasi tidak relevan bila digunakan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan RRT selama masa pemerintahan Scott Morrison. Arah kebijakan Luar Negeri Morrison dalam penerapannya banyak dipengaruhi oleh arah kebijakan dari partai pengusung yakni Liberal serta berkiblat pada Negara aliansi akibat dari semakin agresifnya RRT di kancah internasional. Morrison berdalih memprioritaskan hubungan ekonomi politik yang erat dengan RRT namun dalam prakteknya lebih berfokus pada upaya menghentikan pengaruh RRT di Australia dengan dalih kepentingan nasional. Beberapa aksi yang membuat geram RRT dan dinilai konfrontatif diantaranya tuntutan Morrison kepada RRT akan asal usul virus Covid 19 dan kesepakatan AUKUS guna mengimbangi kekuatan RRT di Indo Pasifik.
Direvisi : 04-04-2023	
Disetujui : 14-04-2023	
Kata kunci: Kompartementalisasi; Konstruktivisme; Ekonomi Politik; Australia & RRT.	<p>ABSTRACT</p> <p><i>Diplomatic relations between Australia and the People's Republic of China (PRC) were inflamed during Scott Morrison's leadership. The Liberal Party's foreign policy direction which focuses on the security sector has more or less influenced Scott Morrison's foreign policy direction during his 3 years of leadership. In Australia, the compartmentalisation strategy well known and initiated by Prime Minister Bob Hawke which has a focus on placing all the differences between Australia and the PRC into a box and separating them in one place. So, how was the construction of the compartmentalisation strategy during the leadership of Scott Morrison? The purpose of this research is to observe an idea and perception of Australia's compartmentalisation strategy in a diplomatic relations with PRC during the leadership of Scott Morrison. The research method is in the corridor of qualitative and descriptive. The construction result of the research has shown that compartmentalisation strategy was not relevance if implementing in diplomatic relationship with PRC during</i></p>
Keywords: Complementary; Constructivism; Political Economic; Australia & PRC	

the leadership of Scott Morrison. Scott Morrison's direction of Australia's foreign policy was influenced by the policy of the supporting party direction, and oriented on alliance state as a result of PRC's aggressiveness in international relationship. Scott Morrison argued that prioritized a close political economy relationship with the PRC but practically restrain PRC's influence in Australia under the name of National Interest. Some of the actions that angered the PRC and were considered as confrontational are asking about the origin of Covid 19 and AUKUS trilateral security pact for balancing PRC's power in the Indo Pasific.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Dahulu Asia di anggap sebagai benua yang miskin, namun Bob Hawke membayangkan Asia sebagai benua yang berpotensi kaya. Pada tahun 1984 hanya sedikit orang yang mengetahui kemana arah dari kebangkitan RRT, namun kebijakan RRT Hawke yang berpandangan jauh ke depan bertepatan dengan meningkatnya optimisme pada dekade 1980an (Fitzsimmons, 2022). Hawke melihat RRT sebagai pasar yang sedang berkembang sehingga menginisiasi strategi kompartementalisasi yang mana inti dari strategi tersebut adalah menempatkan semua perbedaan penting dari hubungan bilateral Australia dengan RRT kedalam sebuah kotak dan memisahkannya di satu tempat. Strategi ini memungkinkan pemerintah Hawke memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dari hubungan bilateral dengan RRT sekaligus juga menangani dan mengelola isu-isu diplomatik yang sensitif dan mengkhawatirkan publik Australia secara efektif (Pekkanen, John Ravenhill, & Baihaqi, 2021). Tujuan utama strategi kompartementalisasi sangat jelas yakni memandang kebangkitan RRT sebagai peluang daripada ancaman, karena jika dilihat sebagai ancaman maka Australia akan kembali ke Negara yang berwawasan rendah. Hawke ingin Australia melihat kebangkitan RRT sebagai hal yang wajar yang akan menciptakan banyak peluang, bukan fenomena yang mengancam kepentingan nasional Australia (The Conversation, 2016). Sekarang ini hubungan bilateral antara Australia dan RRT di donimasi oleh ikatan sumber daya sehingga interdependensi tidak dapat diingkari (Zheng, 2014)

Dengan memisahkan manfaat positif RRT ke dalam suatu kompartemen dan menempatkan hal yang sensitif ke kompartemen yang lainnya sehingga pemerintah Hawke dapat lebih fokus pada kepentingan utama Australia dalam bisnis, perdagangan, keuangan, pendidikan, dan pariwisata. Secara keseluruhan, strategi kompartementalisasi Hawke sangat efektif dan memungkinkan kebijakan RRT Hawke berkembang secara pragmatis dan seimbang, meskipun masih ada keraguan atas perkembangan RRT di kemudian hari. Pemerintahan Hawke terutama berfokus pada peningkatan ekspor ke Negara-negara utama Asia yakni RRT. Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari berbagai sumber Hawke mengambil pendekatan multifaset yang berfokus pada tiga bidang utama yakni (1) pertukaran ekonomi dan perdagangan antara kedua Negara. (2) meningkatkan hubungan diplomatik antara Canberra dan Beijing. (3) Menyeimbangkan

pertimbangan geostrategis selama titik kritis dalam hubungan bilateral. Namun demikian, Hawke tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap aliansi Amerika Serikat (AS). Strategi kompartementalisasi Hawke dinilai membawa pengaruh yang signifikan dan berhasil dengan baik. Mempromosikan bentuk keterlibatan ekonomi yang berfokus pada institusi dan dialog multilateral. Terobosan yang diinisiasinya adalah membentuk Masyarakat Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun 1989 yang mana menekankan pada pendekatan kebijakan RRT dengan melihat potensi manfaat ekonomi yang akan mengalir dari membangun hubungan yang lebih dekat dengan RRT. Hal tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan partai yang dipimpinnya yakni partai Buruh yang mana fokus pada menyeimbangkan masalah hak asasi manusia dengan kepentingan ekonomi yang lebih luas dari hubungan bilateral. Strategi kompartementalisasi yang diinisiasi Hawke ternyata tetap menjadi pedoman bagi penerusnya di pemerintahan (Mulyawan, 2014).

Scott Morrison terpilih sebagai pemimpin Partai Liberal ke 14 pada 24 Agustus 2018. Hal tersebut juga membawanya ke pucuk pimpinan tertinggi politik di Negara Kangguru tersebut. Partai Liberal sendiri dikenal sebagai partai yang memiliki ideologi lebih konservatif yakni mempertahankan apa yang telah ada. Partai Liberal sangat kuat keterikatannya dengan Negara Aliansi seperti Amerika Serikat dan Britania Raya. Tiga tahun masa pemerintahan *Scott Morrison* di rasa sebagian pihak adalah sebagai masa terburuk untuk hubungan antara Australia dan RRT (Syafiq, 2016). Pemerintahan Morrison mewarisi hubungan dengan RRT yang panas serta terkena dampak negative akibat dari pergeseran geostrategis di lingkungan internasional maupun politik Dalam Negeri. Walaupun diawal pemerintahannya Morrison tampak berhati-hati dengan tidak mengkritik RRT namun pada akhirnya Morrison semakin melihat RRT melalui lensa ancaman dan ingin melakukan lindung nilai semaksimal mungkin dan mengakomodasi kepentingan nasional RRT seminimal mungkin. Hal tersebut tercermin pada pidatonya di Washington pada akhir September 2019 di AS dan awal Oktober di Lowy Institute yang mengisyaratkan sikap keras terhadap RRT dalam masalah perdagangan (Symonds et al., 2019). Terdapat dua peristiwa atau aksi yang diinisiasi Morrison selama dia menjabat yang berdampak buruk terhadap hubungan ekonomi politik Australia - RRT yakni (1) memutuskan untuk berada di depan dalam mengusut tuntas asal muasal pandemi Covid 19. (2) kemitraan keamanan AUKUS dengan Inggris dan AS dengan tujuan tersirat untuk mengimbangi RRT di Asia Pasifik. Ini merupakan perubahan dalam permainan di mana menyoroti elemen baru dalam visi strategis Australia terhadap RRT (Hughes, Patalano, & Ward, 2021). Lantas dengan semakin buruknya hubungan antara Australia dan RRT semasa pemerintahan Scott Morrison apakah dapat dikatakan strategi kompartementalisasi yang diwariskan oleh Hawke tidak layak lagi dipakai atau Morrison mengabaikan dan mengambil jalan yang lain atau kondisi global saat ini yang menyebabkan strategi kompartementalisasi menjadi tidak relevan.

Memahami peran atau pengaruh seorang pemimpin merupakan bentuk dari level analisis individu dalam hubungan internasional. Level analisis individu menggunakan pendekatan aktor tertentu yang lebih spesifik dalam hubungan internasional,

berdasarkan asumsi bahwa pengambilan keputusan dalam setiap interaksi dan tindakan Negara adalah individu atau kelompok tertentu, seperti presiden, perdana menteri, atau aktor spesifik lainnya. Dalam menggunakan level analisis individu, peneliti menggunakan berbagai macam perspektif, baik menggunakan perspektif realis yang menekankan pada rasionalitas aktor (Nye, 2019), perspektif kognitif yang menekankan karakteristik atau personalitas pemimpin (Hussain & Shakoor, 2017), maupun konstruktivisme yang menyertakan unsur-unsur non-material dalam pilihan tindakan aktor. Dari beragam cara analisis tersebut, penelitian ini menggunakan konstruktivisme sebagai kerangka analisis.

Konstruktivisme memandang fenomena hubungan internasional dengan tidak terpaku pada faktor kepentingan saja. Menurut (Darmawan, Dwianto, & Akmala, 2022), pada dasarnya konstruktivisme melihat hubungan antarnegara dalam komunitas internasional dari beberapa unsur seperti proses pembelajaran, interaksi antarsubjek yang dibentuk oleh identitas, nilai-nilai, kepentingan dan intensi atau maksud yang kemudian membentuk pola hubungan antara teman atau musuh. Secara sederhana, konstruktivisme melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Konstruktivis cenderung melihat proses sosialisasi dan pembelajaran dari norma, nilai, dan prinsip yang dialami oleh aktor yang berlaku di lingkungan serta budaya sekitarnya dan kemudian diterapkan sebagai kebijakan suatu Negara (Hadiwinata, 2017).

Konstruktivis memperhatikan faktor linguistik dalam membentuk persepsi hubungan antar aktor yang dapat membentuk pola hubungan “pertemanan” atau “permusuhan”. Seperti komunikasi simbolik atau bahasa yang mengandung kepentingan, intensi atau identitas merupakan “bahan mentah” yang mengandung otensitas dan originalitas tinggi. Dalam prakteknya, “bahan mentah” dapat dilihat dari pernyataan para agen. Sedangkan fakta-fakta yang tetap merupakan “bahan jadi” yang telah mengalami penyederhanaan dengan menghilangkan bagian-bagian yang absurd dan tidak masuk akal. Dalam prakteknya, “bahan jadi merupakan dokumen resmi suatu Negara / lembaga seperti kebijakan, peraturan, perjanjian, dan lain-lain

Aspek penting selanjutnya dalam konstruktivisme adalah alasan dan penyebab. Konstruktivisme sering mendasarkan analisisnya pada kausalitas (sebab-akibat) atau menitikberatkan pada pertanyaan seperti “apa yang menyebabkan aktor bertindak”. Sekilas tampak bahwa kausalitas dalam teori konstruktivis hanya menyangkut pemilihan istilah yang dimaksudkan untuk menggantikan kata alasan yang memotivasi aktor untuk melakukan tindakan tertentu atau menemukan hubungan antara aktor, norma, dan identitas. Namun, pada kenyataannya persoalannya tidak sesederhana itu karena terdapat beda yang signifikan antara penyebab yang dilandasi oleh logika dan hukum-hukum tertentu dengan alasan yang menyangkut itensi subjektif. Sederhananya, analisis konstruktivis hanya perlu menunjukkan alasan dan itensi / maksud dari para aktor dalam melakukan tindakan tertentu terlepas dari istilah yang mereka pakai (Hadiwinata, 2017)

Kajian tentang hubungan diplomatik Australia – RRT sudah pernah di bahas oleh beberapa pengamat diantaranya yakni (Sward, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul

“An Empirical Study of China-Australia Bilateral Trade Potential Based on Gravity Model” yang mana menyimpulkan bahwa skala perdagangan, komplementaritas perdagangan, dan potensi perdagangan antara Australia dan RRT terus berkembang. Namun, dari perspektif neraca perdagangan, RRT selalu berada pada posisi Negara defisit, dan defisit yang besar, terutama dalam hal produk primer. Dilihat dari indeks integrasi perdagangan, integrasi perdagangan RRT dengan Australia secara umum menunjukkan tren yang meningkat, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan perdagangan antara RRT dan Australia secara bertahap semakin meningkat. Selain itu ada juga penelitian dari Yixiao Zheng yakni dengan judul “Complex Interdependence and China’s engagement with Australia”, dimana pada penelitian tersebut menitikberatkan pada faktor domestik RRT yang mana sebenarnya membutuhkan sokongan sumber daya dan dalam hal ini sangat membutuhkan pasokan dari Australia. Sedangkan di posisi Australia membutuhkan RRT sebagai pasar yang besar dan sumber devisa. Berdasarkan referensi kedua penelitian diatas, dalam penelitian ini lebih berfokus pada konstruksi strategi kompartementalisasi yang diinisiasi oleh Bob Hawke dalam hubungan ekonomi politik Australia dan RRT pada 3 tahun periode pemerintahan Scott Morrison. Pentingnya pada penelitian ini yakni penulis mencoba mengkonstruksikan kembali strategi kompartemantalisasi tsb. untuk lebih memahami ide dan persepsi serta apakah masih relevan untuk diterapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini di tangkap dalam koridor kajian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami fenomena sosial tentang apa yang di alami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dijelaskan secara deskriptif menggunakan kata – kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode saintifik. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi dan mengidentifikasi mengapa hal tersebut dapat terjadi dengan cara mengintepretasikan informasi yang ada secara lebih komprehensif dan mendalam.

Metode ini penulis menilai sebagai sebuah metode yang tepat agar pengukuran serta analisis dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran dan juga agar pengembangan konsep dan penghimpunan fakta tidak dengan melakukan pengujian hipotesis semata. Data yang digunakan dalam literatur ini adalah data - data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang mana merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah informasi dari buku-buku akademik, jurnal, website, yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian sebagai bahan rujukan, memperoleh data teoritis, serta mendukung kebenaran data penelitian (Danial & Warsiah, 2009).

Analisis yang penulis lakukan adalah terbatas pada isu-isu ekonomi politik dan keamanan terhadap kepentingan nasional Australia menggunakan kajian konstruktivisme. Penelitian ini berada pada sudut pandang Australia semasa pemerintahan Scott Morrison periode 23 Agustus 2018 – 23 Mei 2022.

Hasil dan Pembahasan

1. *History* (Sejarah)

a. **Learning (Pembelajaran)**

Saat Hawke menduduki posisi puncak kepemimpinan politik Australia, RRT dipandang sebagai Negara dengan potensi yang besar namun ideologi komunis dan ketimpangan di masyarakat yang menjadi dilemma bagi Negara-negara dunia dalam melakukan Kerjasama. Harapan Hawke pada saat itu adalah RRT menjadi lebih demokratis dengan semakin industrialisasi dan modernisasinya dalam kerangka sistem internasional. Hawke melihat RRT sebagai pasar yang sedang berkembang namun sangat besar untuk bahan mentah dan kunjungannya pada Februari 1984 ke RRT merupakan momen penting dalam mengintegrasikan Australia dan industri baja RRT (Preston, 2017).

Pemerintahan Hawke tidak melihat dan menyadari bahwa di masa depan RRT bakal begitu raksasa dan dianggap tidak begitu penting sehingga tidak adanya kebijakan khusus bagi RRT. Namun demikian, hal tersebut menjadi positif karena tidak menjadi beban dalam bekerjasama. Oleh sebab itu, strategi kompartementalitas dapat berjalan dengan baik. Australia mencoba mengesampingkan masalah terkait hak asasi manusia, ideologi, otoriter, dsb. dan lebih fokus kepada hal yang menguntungkan bagi kedua Negara yakni di sektor perdagangan.

Berbeda halnya dengan masa pemerintahan Scott Morrison yang mana peralihan pemerintahan dari Turnbull membawa beban dimana RRT telah menjadi raksasa pengaruhnya di anggap mengganggu bagi Negara Barat. Ditambah adanya fakta bahwa RRT berusaha menguasai ekonomi politik Dalam Negeri Australia seperti teknologi 5G, penguasaan saham mayoritas perusahaan tambang, dan alih fungsi kelola Pelabuhan di Negara bagian Victoria. Dengan demikian membawa beban tersendiri apabila Morrison menggunakan strategi kompartementalisasi dengan menutup mata akan hal yang mengganggu kepentingan nasionalnya. Terkecuali pemerintahan Morrison berfokus pada hal terkait sektor keamanan dan juga ambisi untuk menghambat pengaruh RRT di Indo Pasifik karena mengikuti Negara aliansinya yakni AS sehingga menerima konsekuensi ekonomi yang terkena imbasnya. Strategi besarnya telah berubah dari menjaga kerendahan hari menjadi berjuang untuk pencapaian (Yan, 2014).

b. ***Inter-Subjective*** (Interaksi Antar Subjek)

Amerika Serikat mengakui hubungan pribadi Hawke yang sangat dekat dengan para pemimpin utama RRT disamping juga kedekatannya dengan presiden AS Ronald Reagan. Namun demikian Hawke ingin memperkuat aliansi tetapi tidak dengan mengorbankan komplementaritas ekonominya yang berkembang dengan RRT. Jiang Zemin bahkan sampaikan dengan terbuka terhadap Hawke bahwa visi RRT adalah meniru model dan pola pertumbuhan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Seharunya Hawke memahami itensi tersebut dan namun kondisi pada saat tersebut berbeda karena di anggap sebagai upaya merintis suatu hubungan jadi akan lebih baik dengan berfokus pada apa yang menguntungkan keduabelah pihak.

Hubungan pribadi yang Hawke bangun dengan RRT mendorong orang Tionghoa untuk berpartisipasi kedalam organisasi regional. Selain itu juga memanfaatkan hubungan dekatnya dengan para pemimpin RRT untuk bertindak sebagai saluran antara RRT dan AS. Hubungan pribadi Hawke yang dekat dengan para pemimpin RRT memungkinkannya untuk mempersonalisasikan hubungan Australia – RRT lebih dari yang berhasil dicapai oleh orang-orang sezamannya di Barat dan bahkan PM lainnya.

Scott Morrison tidak dekat dengan pemimpin-pemimpin RRT sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti maksud dan arah dari pemerintahan RRT. Selain itu Morrison dekat dengan Negara aliansi yang notabene saat masa pemerintahannya Trump sedang keras – kerasnya menentang RRT. Pernyataan awal Scott Morrison tentang RRT dengan sangat hati – hati untuk tidak mengkritik RRT dan menjauhkan diri dari Bahasa kasar yang semakin keluar dari Washington. Namun tampaknya tidak bertahan lama. Morrison pun semakin lantang dalam menyuarakan apa yang dianggap sebagai dugaan kecurangan yang dilakukan RRT. Dalam hal ini, sudah tidak adanya lagi komunikasi antara kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang menyebabkan strategi kompartementalisasi tidak relevan untuk digunakan. Masing – masing pihak saling tuding bahkan menjurus ke arah fitnah.

c. Co – Determine (Saling Mempengaruhi)

Perkembangan RRT menghadirkan komplementaritas struktural yang sangat besar antara Australia dan RRT, dalam hal permintaan RRT seperti apa yang akan terjadi dengan industrialisasi dan pembukaan ekonomi serta urbanisasi dan apa kapasitas pasokan Australia nantinya. Namun demikian walaupun situasi memanas di masa kepemimpinan Scott Morrison walaupun adanya penurunan perdagangan akibat dari penerapan tarif impor dari RRT namun hanya untuk komoditas tertentu saja tidak pada komoditas biji besi dan tambang karena pada dasarnya Australia membutuhkan itu. Keefektifitasan strategi kompartementalisasi lagi-lagi harus diabaikan. Walaupun semakin memanas namun di rasa hanya sementara terutama hanya selama masa kepemimpinan 3 tahu Morrison saja.

2. Political Reality (Realitas Politik)

Dengan itensi yang disampaikan Jiang Zemin kepada Hawke berujung pada semakin eratnya hubungan kedua belah pihak. Di periode awal kebijakan RRT pemerintahan Hawke, penekanannya lebih pada perdagangan dan investasi dan ekonomi daripada pada implikasi strategis dari kebangkitan RRT. Tujuan kompartementalisasi adalah selain lebih fokus dalam melihat peluang juga memberikan kesempatan berupa toleransi terkait dengan hak asasi manusia dengan harapan bahwa RRT akan secara bertahap meliberalisasi dan akhirnya mendemokratisasi sistem politiknya (Fitzsimmons, 2022). Kejadian Tiananmen juga membuat goyah hubungan yang harmonis tersebut walaupun Australia menanggukkan semua kontak Menteri dengan RRT dan memblokir pendanaan baru untuk proyek-proyek pembangunan namun pemerintahan Hawke tetap berhati-hati. Hawke memandang hubungan ekonomi dengan RRT dengan sangat penting dan bertekad untuk tidak membiarkan agenda hak asasi manusia mengurangi hubungan bilateral secara keseluruhan.

Strategi kompartementalisasi Hawke signifikan, dan berhasil dengan baik karena Hawke mempromosikan bentuk keterlibatan ekonomi yang berfokus pada institusi dan dialog multilateral. Arah directive dan commissive dilakukan Hawke dengan mengusulkan agar RRT menjadi anggota APEC. Inisiatif APEC pemerintahan Hawke dan dialog multilateral yang lebih erat dengan Negara-negara ASEAN merupakan upaya untuk mewujudkan aktivisme kekuatan menengah untuk mempromosikan dan mengintegrasikan RRT secara lebih penuh ke dalam komunitas Asia Pasifik dengan membuat Beijing lebih terlibat dalam mengembangkan Lembaga dan dialog multilateral baru. Sedangkan Morrison telah memperjuangkan keterlibatan dan hubungan ekonomi yang lebih erat dengan RRT sementara juga memblokir investasi RRT berdasarkan alasan keamanan nasional (Huawei). Namun hal tersebut hanya wacana karena beberapa friksi – friksi yang di bangun saat pidatonya mengindikasinya Tindakan yang konfrontatif terhadap RRT.

Sebagai penutup, penulis memiliki pandangan bahwa saling pengertian antara pemimpin Negara-negara seperti RRT dan Australia menjadi penting karena ketika ada masalah antara kedua Negara maka ada jalur komunikasi langsung antara para pemimpin untuk saling berkonsultasi tentang masalah-masalah sulit dalam hubungan Australia – RRT. Ketika para pemimpin memiliki lebih banyak kesamaan daripada mereka memiliki hal-hal yang tidak sama, maka krisis dapat diselesaikan dan dikelola dengan lebih baik sebelum mencapai titik didih. Strategi Kompartementalisasi dapat dihidupkan kembali dengan catatan bahwa komunikasi antar Negara telah jelas dan terang benderang dan telah dituangkan kedalam suatu perjanjian yang konkret agar dikemudian hari tidak adanya beban sehingga dapat lebih efektif dalam memisahkan permasalahan satu dengan yang lainnya atau dengan memperkuat kembali ChAFTA yang telah mencapai kata sepakat dan ditandatangani pada 17 Juni 2015 serta memanfaatkan RCEP yang telah diikuti oleh 15 Negara dan efektif tanggal 1 Januari 2022 untuk meningkatkan transaksi perdagangan sehingga lebih berfokus kepada hal ekonomi semata.

Kesimpulan

Setelah melihat konstruksi dari strategi Kompartementalisasi yang digagas Bob Hawke maka dapat disimpulkan bahwasan strategi tersebut tidaklah relevan apabila digunakan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan RRT selama masa pemerintahan Scott Morrison dikarenakan perbedaan itensi, motivasi, dan kondisi. Pada masa kepemimpinan Bob Hawke di mana RRT sedang dalam fase perkembangan ekonomi dan dilihat Australia sebagai peluang. Dasar dari strategi kompartementalisasi guna mencapai hubungan yang harmonis yaitu mengutamakan komunikasi sejak semula antara kedua belah pihak agar goal yang diinginkan dapat tercapai. Atas dasar tersebut dan telah jelasnya fokus yang akan dituju maka Australia dan RRT sepakat untuk menempatkan permasalahan di luar dari tujuan utama kedalam kotak yang terpisah. Hal demikianlah mendukung hubungan diplomatik menjadi harmonis.

Sedangkan di masa pemerintahan Scott Morrison, kondisi ekonomi dan geopolitik telah berubah drastis bila dibandingkan masa pemerintahan Bob Hawke. Maka dari itu strategi kompartementalisasi menjadi tidak relevan apabila Scott Morrison harus memisahkan permasalahan ke dalam kotak yang berbeda. Australia berada diposisi yang paling dirugikan apabila mengesampingkan masalah lainnya diluar dari tujuan utama dalam berhubungan dengan RRT. Semua komponen harus menjadi bahan pertimbangan dan berjalan beriringan. Dengan semakin agresif-nya RRT di kancah internasional dan tindak tanduk RRT dalam mempengaruhi ekonomi politik Dalam Negeri Australia yang di anggap mengganggu keamanan dan kepentingan nasional maka penulis menilai Scott Morrison sudah tepat dalam merespon RRT walaupun pada akhirnya hubungan diplomatik kedua Negara menjadi panas. Namun sebelum merespon secara terbuka ke publik ada baiknya dikomunikasikan dan disampaikan dalam bentuk nota keberatan kepada RRT dengan menegaskan akan fokus pada kepentingan nasional Australia.

Bibliografi

- Darmawan, Arief Bakhtiar, Dwianto, Rahmad Agus, & Akmala, Herdho Husna. (2022). Konstruksi Ide Xi Jinping dalam Belt And Road Initiative. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 45–61. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19876>
- Fitzsimmons, David. (2022). *Australia's Relations with China: The Illusion of Choice, 1972-2022*. Taylor & Francis.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hughes, Christopher W., Patalano, Alessio, & Ward, Robert. (2021). Japan's grand strategy: the Abe era and its aftermath. *Survival*, 63(1), 125–160.
- Hussain, Nazir, & Shakoor, Fatima. (2017). The role of leadership in foreign policy: A case study of Russia under Vladimir Putin. *IPRI Journal*, 17(1), 1–25.
- Mulyawan, Brian Adam. (2014). Faktor–Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme di Indonesia Kurun Waktu 2002–2005. *Global and Policy Journal of International Relations*, 2(02).
- Nye, Andrea. (2019). *Words of power: A feminist reading of the history of logic*. Routledge.
- Pekkanen, Saadia M., John Ravenhill, Rosemary Foot, & Baihaqi, Imam. (2021). *Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Korea Utara: Handbook Hubungan Internasional ASIA*. Nusamedia.
- Preston, Thomas. (2010). Leadership and foreign policy analysis. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.255>
- Sward, Jeffrey Aaron. (2022). *Modeling Tools for Wind and Solar Integration and Air Quality Co-benefits in a Zero-Carbon Future*. Cornell University.
- Syafiqa, Alvia. (2016). *Aliansi pertahanan Taiwan-Amerika Serikat dalam menghadapi One China Policy Periode 2011-2014*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Symonds, Joseph D., Zuberi, Sameer M., Stewart, Kirsty, McLellan, Ailsa, O'Regan, Mary, MacLeod, Stewart, Jollands, Alice, Joss, Shelagh, Kirkpatrick, Martin, & Brunklaus, Andreas. (2019). Incidence and phenotypes of childhood-onset genetic epilepsies: a prospective population-based national cohort. *Brain*, 142(8), 2303–2318. <https://doi.org/10.1093/brain/awz195>